

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin hingar-bingar dengan kemajuan di sisi teknologi maupun pengetahuan, bisnis juga mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Namun, di balik kemajuan dan perkembangan tersebut terdapat persaingan yang ketat antar perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya dengan tujuan agar tetap bertahan dalam pasar. Salah satu cara untuk mempertahankan bisnis adalah membuat dan menerapkan suatu standar untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan adanya suatu standar tersebut, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan perusahaan (Nabilla & Hasin, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM RI perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.496 unit. Dari jumlah tersebut, 98,7% atau sebanyak 64.601.352 unit adalah usaha mikro, 1,2% atau sebanyak 798.679 unit adalah usaha kecil, dan sisanya 0,1% atau sebanyak 65.465 unit adalah usaha menengah. Berdasarkan hal tersebut, jumlah usaha mikro jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah usaha kecil dan usaha menengah (Lestari, Pujiyanto, & Kastaman, 2022).

Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam membangun kemajuan suatu bangsa dan dapat menjadi indikasi kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat menunjukkan sektor perekonomian kuat. Sektor perekonomian tidak hanya

dibangun oleh industri-industri besar, tetapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari kegiatan sektor perekonomian yang tertuju pada ekonomi lokal yang mempunyai peran dan potensi dalam membangun perekonomian nasional. Akan tetapi keberadaan UMKM saat ini masih banyak terbentur kendala, kurang pemahaman mengatur kelancaran kegiatan operasional sebuah usaha, prosedur yang kurang terorganisir sehingga akses untuk membangun usaha tersebut menjadi terhambat. Permasalahan tersebut juga terjadi pada sebagian besar UMKM di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian besar UMKM tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penganggaran usaha. Padahal bahwasanya SOP ini sangat penting untuk mengatur karyawan, tapi juga sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas rutin harian yang berhubungan dengan usaha (Triwidatin, 2021).

Saat ini, pelaku UMKM di Indonesia kebanyakan tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai dalam menjalankan usahanya sehingga terkadang UMKM tersebut beroperasi secara tidak berkelanjutan (muncul lalu hilang, lalu muncul kembali). Para pelaku UMKM menjalankan usaha hanya terbatas pada bagaimana memperoleh laba tanpa mengelolanya dengan baik di segala aspek yang terdapat dalam sebuah usaha atau bisnis, misalnya pada aspek operasional yang tidak memiliki acuan yang tetap sehingga menghasilkan produk yang tidak terstandarisasi. Dampak dari tidak adanya standarisasi terhadap produk yang dihasilkan menjadikan mutu produk tidak terjaga dan tidak dapat dievaluasi dengan tepat prosesnya. Maka dalam suatu lembaga usaha dibutuhkan SOP, yaitu Standar Operating Procedure untuk mencatat secara tertulis prosedur pengoperasian standar dalam seluruh melaksanakan kegiatan operasi, yang dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan dipatuhi (Pratama, Wulandari, & Yurniati, 2023).

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kegiatan operasional berjalan secara efisien, konsisten, dan sesuai standar yang berlaku. SOP menjadi pedoman tertulis yang merinci

langkah-langkah kerja sehingga karyawan dapat melaksanakan tugas dengan benar, mengurangi risiko kesalahan, serta menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Penerapan SOP juga membantu mempercepat aliran kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi maupun standar industri. Dalam praktiknya, implementasi SOP dimulai dari identifikasi proses yang membutuhkan standar, penyusunan prosedur yang jelas dan mudah dipahami, pelatihan bagi karyawan, hingga monitoring dan evaluasi berkala agar selalu relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Jika SOP diterapkan dengan baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, menekan biaya produksi, dan menciptakan kepercayaan pelanggan melalui konsistensi layanan maupun produk. Sebaliknya, ketiadaan SOP berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kualitas produk yang menurun, efisiensi yang rendah, meningkatnya risiko kecelakaan kerja, hingga pelanggaran hukum dan regulasi (Rahmawati & Suryana, 2024).

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa diajak untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah melalui Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM), sebuah program yang menempatkan mahasiswa di tengah masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan potensi daerah sekaligus melatih keterampilan sosial dan profesional mahasiswa.

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya melaksanakan PKPM dengan tema "Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Teknologi Digital dan Ekonomi Kreatif". Kegiatan PKPM ini dilaksanakan di Lampung Selatan oleh 62 kelompok yang terdiri dari 6-7 peserta pada setiap kelompoknya. Para peserta tersebar di Kecamatan yang berbeda, salah satunya adalah Kecamatan Kalianda. Kegiatan PKPM ini berlangsung sejak 21 Juli 2025 hingga 22 Agustus 2025.

Desa bulok, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, yang memiliki potensi dibidang pertanian dan perikanan. Selain dalam bidang pertanian dan perikanan, terdapat juga beberapa UMKM yang berpotensi besar. Salah satu unit usaha nya yaitu pengepul gula merah yang berperan penting sebagai penghubung antara penghasil gula merah dengan pasar. Pengepul berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang membeli produk dari penghasil gula merah, tetapi juga mengelola proses penerimaan, penyimpanan, pengendalian kualitas, dan distribusi agar produk sampai ke konsumen dalam kondisi baik.

Namun dalam praktiknya, sebagian pengepul gula merah di Desa Bulok masih menghadapi kendala dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan terstruktur. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya pedoman baku dalam proses penerimaan barang, penyimpanan yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, minimnya pengendalian kualitas secara sistematis, serta distribusi yang belum terjadwal dengan baik. Kondisi ini dapat mempengaruhi mutu produk, efisiensi kerja dan kepuasan konsumen.

Oleh karena itu, penerapan SOP menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan kerja pengepul gula merah berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten. SOP yang terstruktur akan membantu menjaga kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pasar. Kegiatan PKPM ini mengangkat judul “Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gula Kelapa Alif: Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian Kualitas, dan Distribusi di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan” sebagai bentuk pendampingan dan implementasi SOP yang tepat guna mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing produk gula merah di daerah tersebut.

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

Desa Bulok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan bentang alam yang didominasi oleh perkebunan kelapa, ladang, serta area pemukiman penduduk. Berdasarkan data pemerintahan desa, jumlah penduduk Desa Bulok mencapai ± 2.350 jiwa, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, khususnya penghasil nira kelapa untuk diolah menjadi gula merah.

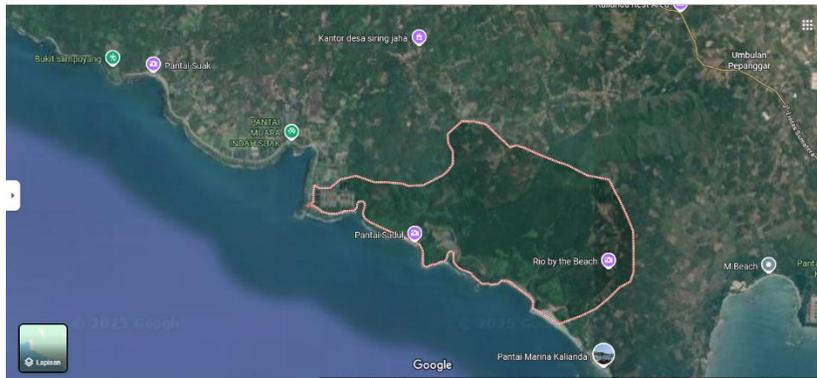
Secara geografis, Desa Bulok berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Desa Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo

Sebelah Selatan : Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda

Sebelah Barat : Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo

Sebelah Timur : Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda



Gambar 1.1 Peta wilayah

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Desa

No	Jabatan	Nama
----	---------	------

1.	Kepala Desa	Samsuddin Hr
2.	Sekretaris Desa	Adi Gunawan
3	Kepala Urusan Keuangan	Samsul Hadi
4	Kepala Urusan TU & Umum	Edi Suhendra
5	Kepala Urusan Perencanaan	Alfin Nur Sobachi
6	Kepala Seksi Pemerintah	Irawan
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	Fadlya Sandi
8	Kepala Seksi Pelayanan	Desi Asturi
9	Operator Desa	Agus Aliana

Tabel 1.2 Pembagian wilayah desa

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1.	Dusun 1 Bulok Dalam	4 RT
2.	Dusun 2 Bulok Luar	4 RT
3.	Dusun 3 Sepepih	2 RT
4.	Dusun 4 Damakh Bekhak	2 RT
5.	Dusun 5 Lasak Utan	2 RT

Tabel 1.3 Kepemimpinan Desa Bulok dari tahun 1968-2029

No	Nama Kepala Desa	Tahun Pemerintahan
1.	Yahya Khadin Tihang	1968-1982
2.	Tumenggung Warta Manggala	1982-1991
3.	Andi Aziz Lahar	1991-1999
4.	Samsuddin. Hr	1999-2015
5.	M. Kuswanto	2015-2021

6.	Samsuddin. Hr	2021-2029
----	---------------	-----------

1.1.2 Profil BUMDES

BUMDes Mekar Lestari adalah Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk sekaligus dikelola oleh Pemerintah Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kehadiran BUMDes ini menjadi salah satu strategi desa untuk memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya bergerak sebagai lembaga usaha, BUMDes juga berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam pembangunan desa, membuka peluang kerja baru, serta mendorong peningkatan pendapatan warga secara berkesinambungan.

Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mekar Lestari adalah di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan nila. Pemilihan usaha ini didasarkan pada potensi sumber daya alam Desa Bulok yang mendukung serta prospek ekonomi ikan nila yang cukup menjanjikan. Melalui pengembangan usaha ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan penghasilan, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing desa dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

1.1.3 Profil UMKM

Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa UMKM yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekaligus mencerminkan potensi lokal. UMKM yang berkembang di desa ini antara lain:

1. Lamban Daun Kelor

Lamban Daun Kelor adalah salah satu badan usaha yang didirikan oleh Bapak Pujo sejak tahun 2018. UMKM ini berada di sekitar Desa Bulok Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lamban Kelor

Bulok adalah usaha yang mana berfokus dengan olahan dari daun kelor. Daun kelor diolah menjadi produk yang layak dikonsumsi dan bermanfaat untuk kesehatan. UMKM ini melayani penjualan dalam bentuk online maupun offline. Lamban Kelor Bulok menyediakan olahan daun kelor berupa Bubuk Kelor, Teh Celup Kelor, Kapsul Kelor, dan Masker Wajah Kelor.

2. Jaya Tapis

Jayatapis Bulok merupakan bagian dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang fokus pada kerajinan tapis khas Lampung. Proses pembuatan tapis biasanya dilakukan di rumah masing-masing anggota, namun saat ini hanya terdapat dua anggota aktif yang masih konsisten menenun. Sistem penjualan dilakukan secara custom pre-order, bekerja sama dengan DEKRANASDA untuk pemasaran. Selain memproduksi, Jayatapis Bulok juga aktif mengadakan pelatihan dan sosialisasi menapis ke berbagai kecamatan. Menariknya, rata-rata peserta pelatihan sudah mahir dalam waktu lima hari.

3. Gula Kelapa Alif

Gula Kelapa Alif yang dikelola oleh Pak Samsul Hadi adalah bisnis yang dimulai pada tahun 2014 dan fokus pada pengumpulan serta penjualan gula kelapa dari petani lokal. Berada di wilayah Desa Bulok, Kalianda, Lampung Selatan. Pak Samsul Hadi peranan penting antara pembuat gula kelapa tradisional dengan pasar yang lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah yang dapat dirumuskan

1. Bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dalam proses penerimaan, penyimpanan gula merah oleh pengepul di Desa Bulok agar kualitas produk tetap terjaga sejak awal?
2. Bagaimana penerapan SOP dalam distribusi gula merah agar pengiriman produk lebih efektif, efisien dan tepat waktu?

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari praktik kerja pengabdian masyarakat ini adalah

1. Untuk menerapkan SOP yang terstruktur dan sesuai standar dalam proses penerimaan gula merah oleh pengepul di Desa Bulok
2. Untuk menyusun dan menerapkan prosedur pengendalian kualitas gula merah agar produk memiliki mutu yang konsisten dan sesuai permintaan pasar

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat dilaksanakannya PKPM ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Menambah wawasan masyarakat pentingnya SOP dalam meningkatkan kualitas usaha
- b. Mendorong terciptanya usaha yang lebih teratur dan efisien
- c. Meningkatkan daya saing produk di pasar
- d. Memperkuat kerja sama antara pelaku usaha dengan pihak luar, termasuk perguruan tinggi

1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman langsung dalam penerapan SOP pada kegiatan usaha
- b. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha
- c. Melatih kemampuan memecahkan masalah di lapangan
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial

1.4.3 Manfaat Bagi IIB Darmajaya

- a. Menambah kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pengembangan usaha masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi mahasiswa melalui praktik langsung di lapangan
- c. Memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku UMKM dan pemerintah desa

1.5 Mitra Yang Terlibat

- a. Kepala Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Dosen Pembimbing Lapangan
- c. Staff Pemerintahan Desa Bulok
- d. Masyarakat Desa Bulok
- e. UMKM Desa Bulok